



**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 11 maret 2019
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komsii II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pertanahan
Ketua Rapat	: Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 8 Anggota Panja RUU Pertanahan B. DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia C. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) D. Direksi Kawasan Industri E. Tim Panitia Kerja RUU Tentang Pertanahan dari Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) dan Direksi Kawasan Industri yang dihadiri oleh Tim Panitia Kerja RUU Tentang Pertanahan dari Pemerintah pada hari Senin, 11 maret 2019 dalam rangka Mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pertanahan, dibuka pada pukul 13.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan terkait RUU tentang Pertanahan yang disampaikan oleh DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) dan Direksi Kawasan Industri. Setelah mendengarkan masukan terkait RUU tentang Pertanahan, Komisi II DPR RI akan melakukan pendalaman atas masukan tersebut sebagai bahan dalam pembahasan RUU Pertanahan bersama Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Jakarta, 11 Maret 2019
KETUA RAPAT

TTD

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI
A-419